

**THE IMPLEMENTATION POLICY OF THE MERDEKA
CURRICULUM IN ELEMENTARY SCHOOLS, CLUSTER 1 LABUHAN
HAJI DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY**

Oleh: Atiaturrahmaniah, I Wayan Lasmawan, I Wayan Suastra, Muh. Yazid

Universitas Hamzanwadi, Universitas Pendidikan Ganesha
Email: atiarahmania1980@hamzanwadi.ac.id

Abstract

This article examines the implementation, support, and challenges faced in adopting and implementing the Merdeka Curriculum in Cluster 1 elementary schools in Labuhan Haji District, East Lombok Regency. The Merdeka Curriculum is a new educational framework in Indonesia aimed at addressing the learning crisis and empowering schools with autonomy and independence in determining teaching and learning approaches. The study employs qualitative descriptive research, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that SDN 4 Labuhan Haji, as a pioneering school, has implemented the Merdeka Curriculum through intracurricular, co-curricular, and extracurricular activities. However, the other five schools are still using a "self-learning" option. The understanding of teachers and support from the local Department of Education have been crucial in facilitating the implementation of the curriculum. Nevertheless, challenges such as low teacher commitment, limited instructions and policies, inadequate access to funds, and technological proficiency hinder the effective implementation of the Merdeka Curriculum. The study provides insights into the implementation process, government support, and obstacles encountered, contributing to a better understanding of the Merdeka Curriculum in elementary

Keywords: Merdeka curriculum, Curriculum implementation, Local government support

Abstrak

Artikel ini mengkaji implementasi, dukungan, dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi dan menerapkan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar Gugus 1 di Kabupaten Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Kurikulum Merdeka adalah kerangka pendidikan baru di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi krisis pembelajaran dan memberdayakan sekolah dengan otonomi dan kemandirian dalam menentukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SDN 4 Labuhan Haji, sebagai sekolah perintis, telah menerapkan Kurikulum Merdeka melalui kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler. Namun, lima sekolah lainnya masih menggunakan opsi "mandiri belajar". Pemahaman guru dan dukungan dari Dinas Pendidikan setempat menjadi krusial dalam memfasilitasi implementasi kurikulum. Namun, tantangan seperti komitmen guru yang rendah, instruksi dan kebijakan yang terbatas, akses yang tidak

memadai terhadap dana, dan kecakapan teknologi menghambat implementasi yang efektif dari Kurikulum Merdeka. Penelitian ini memberikan wawasan tentang proses implementasi, dukungan pemerintah, dan hambatan yang dihadapi, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang Kurikulum Merdeka di sekolah dasar.

Kata Kunci: Kurikulum merdeka, Implementasi kurikulum, Dukungan pemerintah

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dengan karakter Pancasila, menjadikan mereka yang beriman, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berpengetahuan, berpikiran kritis, menerima keragaman, bersifat kooperatif, dan kreatif. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerahkan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman, demokrasi, dan martabat, memajukan peradaban, serta mempromosikan kesejahteraan baik dalam aspek fisik maupun spiritual manusia¹.

Di Indonesia, pengembangan kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan peningkatan, seperti pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997 (revisi kurikulum 1994), 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan 2006 (Kurikulum Berbasis Sekolah). Pada tahun 2013, kurikulum dikenal sebagai Kurikulum 2013 atau "kurtilas". Akhirnya, muncul kurikulum merdeka².

Salah satu wacana yang diadvokasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, adalah "merdeka belajar". Tiga kebijakan lainnya termasuk penghapusan ujian nasional pada tahun 2021, yang digantikan dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan selama tahun ajaran, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan siswa baru³.

Implikasi konsep "merdeka belajar" dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar, menurut⁴, termasuk tujuan, fleksibilitas, dan kegunaan. Mengenai orientasi tujuan, "merdeka belajar" menjadi proses yang berorientasi pada tujuan. Standar prestasi belajar sudah jelas dalam Kurikulum 2013. Namun, cara mencapai standar tersebut dibiarkan kepada guru untuk mengembangkan pola interaksi yang sesuai berdasarkan kondisi kelas masing-masing. Ini menuntut keterampilan improvisasi guru untuk membuat pembelajaran lebih efektif, memperkaya, menarik, dan menyenangkan. Dalam hal fleksibilitas, saat mengimplementasikan "merdeka belajar," guru dapat fleksibel memilih dan menentukan strategi atau metode yang akan digunakan. Namun, jika proses pembelajaran menghadapi hambatan, guru dapat menggunakan kebebasan dan kreativitas mereka untuk mencari dan memilih strategi atau pendekatan

¹ Kemedikbudristek, "Dasar, Fungsi, Dan Tujuan Pendidikan Nasional," *Kemendikbudristek*, last modified 2022, <https://sidiknas.kemdikbud.go.id/dasar-fungsi-dan-tujuan-pendidikan-nasional/>.

² Yuliyanti Yuliyanti, Evi Damayanti, and Lukman Nulhakim, "Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar Di Indonesia Dan Perbedaan Dengan Kurikulum Di Beberapa Negara," *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 11, no. 3 (2022): 95–106.

³ Agung Siswoyo, *Merdeka Belajar* (Penerbit Lakeisha, 2021).

⁴ Abdul Hadi et al., "New Paradigm of Merdeka Belajar Curriculum in Schools," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 2 (2023): 1497–1510.

alternatif untuk mencapai tujuan. Dalam hal kegunaan, saat guru dan pembuat kebijakan merencanakan kurikulum, menurut Menteri Nadiem Makarim, harus difilter melalui pertanyaan, "Apa manfaatnya bagi siswa di masa depan?" Dengan demikian, saat guru mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan memasukkan kompetensi inti dan dasar, mereka harus mempertimbangkan kegunaannya bagi siswa di masa depan. Ini berarti guru tidak hanya menyiapkan RPP sebagai "upacara" tetapi selalu memikirkan manfaat untuk masa depan siswa⁵.

Kurikulum "merdeka" pertama kali diterapkan di sekolah percontohan pada tahun 2021 untuk kelas 1 dan 4. Pemerintah menyiapkan tiga pilihan, termasuk membiarkan sekolah non-percontohan memilih dari tiga opsi dalam mengimplementasikan kurikulum "merdeka". Pertama, mengimplementasikan sebagian prinsip kurikulum "merdeka" tanpa mengubah kurikulum sekolah yang ada. Kedua, menggunakan kurikulum "merdeka" dengan memanfaatkan sumber belajar yang disiapkan. Ketiga, menggunakan kurikulum "merdeka" dengan mengembangkan bahan pengajaran secara mandiri⁶.

Dalam implementasi kurikulum "merdeka" di unit pendidikan, terdapat banyak tantangan dan hambatan, terutama dalam menanamkan pemahaman dan minat di antara sekolah-sekolah. Penelitian tentang implementasi kurikulum Merdeka telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ineu Sumarsih⁷ dan Restu Rahayu⁸, penelitian-penelitian itu mengkaji bagaimana implementasi kurikulum Merdeka hanya di sekolah penggerak. Berdasarkan hasil penelitian itu, menjadi celah bagi peneliti untuk melakukan analisis implementasi kurikulum Merdeka tidak hanya pada sekolah penggerak saja.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Disebut sebagai studi deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis, akurat, dan faktual membuat gambaran umum tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti⁹. Alasan penggunaan penelitian deskriptif kualitatif adalah agar peneliti dapat mendeskripsikan kondisi yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

⁵ Agustinus Tanggu Daga, "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 Hingga Kebijakan Merdeka Belajar)," *Jurnal Edukasi Sumba (JES)* 4, no. 2 (2020): 103–110.

⁶ Restu Rahayu et al., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6313–6319.

⁷ Ineu Sumarsih et al., "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 8248–8258.

⁸ Ibid.

⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau situasi yang sedang diteliti¹⁰. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan secara sistematis mengamati fenomena atau perilaku yang sedang diteliti.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen atau sumber informasi relevan lainnya yang terkait dengan penelitian¹¹. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari individu atau kelompok yang terkait dengan topik penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis, arsip, atau catatan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

C. Landasan Teoritis

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan komprehensif untuk proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Ini mencakup berbagai elemen seperti tujuan pembelajaran, isi mata pelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan sumber daya yang digunakan dalam pendidikan. Kurikulum bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan dalam merancang dan mengimplementasikan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan¹².

Beane (1986) dalam "*Curriculum Planning and Development*" menyatakan bahwa kurikulum dapat dikategorikan menjadi empat jenis: 1) kurikulum sebagai produk, 2) kurikulum sebagai program, 3) kurikulum sebagai pembelajaran yang direncanakan, dan 4) kurikulum sebagai pengalaman nyata. Berdasarkan pemahaman kronologis tentang kurikulum yang diajukan oleh Beane, hal ini menunjukkan keragaman pendapat di antara penulis kurikulum dalam mendefinisikan kurikulum. Keragaman ini bermanfaat untuk analisis, karena menunjukkan bahwa konsep kurikulum mengandung banyak dimensi yang memengaruhi pengambilan keputusan para perencana, pengembang, dan pelaksana kurikulum¹³.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten penting untuk memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk menyelami konsep dan

¹⁰ Tutik Rachmawati, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *UNPAR Press* 1 (2017): 1–29.

¹¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

¹² Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran* (Bumi Aksara, 2022).

¹³ S Pd Sudarman, "BUKU AJAR PENGEMBANGAN KURIKULUM" (n.d.).

memperkuat kompetensi mereka¹⁴. Berbagai penelitian nasional dan internasional telah menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran yang berkepanjangan. Studi-studi ini mengindikasikan bahwa banyak anak-anak Indonesia kesulitan memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dari upaya untuk memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah berlangsung lama yang kita hadapi¹⁵.

Dasar hukum pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri (Permendikbudristek) tahun 2022, nomor 5, yang merumuskan standar kelulusan pendidikan anak usia dini, termasuk pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Peraturan Menteri (Permendikbudristek) tahun 2022, nomor 7, mengenai pendidikan anak usia dini, yang menyelaraskan standar konten pendidikan dasar dan menengah.
- 3) Peraturan Menteri (Permendikbudristek) tahun 2022, nomor 56, yang memberikan pedoman dalam mengimplementasikan kurikulum dan aspek terkait pengembangan pengajaran dan pembelajaran.
- 4) Keputusan Kepala BSKAP (Badan Standar Nasional Pendidikan) nomor 008/H/KR/2022 tahun 2022, yang terkait dengan pencapaian target proses pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, termasuk pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan panduan Kurikulum Merdeka.
- 5) Keputusan Kepala BSKAP nomor 009/H/KR/2022 tahun 2022, yang terkait dengan profil peserta didik Pancasila sesuai dengan Kurikulum Merdeka, yang mencakup dimensi, elemen, dan subelemen dalam diskusinya¹⁶.

¹⁴ Lilis Suryani et al., "Independent Curriculum Implementation Training For the Learning Teacher Community in Setu District," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa 2*, no. 1 (2023): 39–50.

¹⁵ Marsela Yulianti et al., "PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN KURIKULUM MERDEKA," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial 1*, no. 3 (2022): 290–298.

¹⁶ Anas Anas et al., "Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI)(Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022)," *Journal of Creative Student Research 1*, no. 1 (2023): 99–116.



Gambar 1. Dasar hukum Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka, yang pertama kali diuji coba pada tahun 2020, akan diimplementasikan mulai tahun 2022. Kurikulum ini awalnya diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada tahun 2019. Hal ini didorong oleh temuan Program for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia menempati peringkat keenam dari bawah. Penelitian ini mendorong Menteri Pendidikan untuk memperkenalkan konsep kurikulum baru. Kurikulum Merdeka menekankan otonomi dan kemandirian untuk pendidikan di Indonesia, memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan menentukan metode dan pendekatan terbaik untuk proses pengajaran dan pembelajaran¹⁷.

Ada tiga konsep utama yang difokuskan dalam kurikulum ini, yaitu komitmen dan tujuan pembelajaran yang sejalan dengan kebutuhan, minat, dan aspirasi siswa. Kurikulum Merdeka juga melaksanakan proyek bernama "Penguatan Profil Peserta Didik Pancasila". Proyek ini melibatkan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dengan tujuan dan dimensi untuk mewujudkan Profil Peserta Didik Pancasila. Melalui kegiatan tersebut, sekolah dapat mempersiapkan tema-tema khusus yang ditentukan berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat diimplementasikan melalui kegiatan rutin atau kegiatan pembelajaran berbasis praktik, dengan mengintegrasikan Profil Peserta Didik Pancasila.

¹⁷ Ifa Afida, Eka Diana, and Dhevin M Q Agus Puspita, "Merdeka Belajar Dan Pendidikan Kritis Paulo Friere Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 02 (2021): 45–61.

Profil Peserta Didik Pancasila mencakup nilai-nilai berikut: (1) iman dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan karakter yang mulia, (2) keberagaman global, (3) kerjasama dan solidaritas, (4) kemandirian, (5) berpikir kritis, dan (6) kreativitas. Penerapan Profil Peserta Didik Pancasila juga dapat diimplementasikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Implementasi nilai-nilai dalam Profil Peserta Didik Pancasila penting untuk memperkuat karakter siswa¹⁸.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kurikulum Merdeka telah dimulai di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) hingga tingkat sekolah menengah (SMA/MA/SMK) sejak tahun akademik 2021/2022. Beberapa sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka melalui program Sekolah sebagai Penggerak (PSP), sementara yang lain menerapkannya secara mandiri melalui pendekatan IKM-M (Implementasi Mandiri Kurikulum Merdeka). Terdapat pemahaman yang beragam di antara sekolah-sekolah di Lombok Timur mengenai implementasi Kurikulum Merdeka, dan tidak semua sekolah menerapkannya dengan sepenuh hati. Bahkan, ada sekolah yang ragu-ragu untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

Untuk mengumpulkan data mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar Gugus 1 di Kecamatan Labuhan Haji, saya telah meminta bantuan pengawas untuk mengumpulkan guru dan kepala sekolah dari SDN 6 Labuhan Haji, serta memberikan dukungan kepada guru dalam mengidentifikasi kesulitan fungsional siswa. Berdasarkan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta observasi yang dilakukan di sekolah dasar Gugus 1, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, diperoleh data sebagai berikut:

- a) Terdapat total 6 sekolah dasar di Gugus 1, yaitu SDN 1 Labuhan Haji, SDN 2 Labuhan Haji, SDN 3 Labuhan Haji, SDN 4 Labuhan Haji, SDN 5 Labuhan Haji, dan SDN 6 Labuhan Haji. Dari keenam sekolah tersebut, hanya SDN 4 Labuhan Haji yang menjadi sekolah penggerak dan merupakan Angkatan pertama dari program PSP, sedangkan 5 sekolah lainnya bukan sekolah penggerak, sehingga menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
- b) Jumlah kelas di setiap sekolah adalah sebagai berikut: 1) SDN 1 Labuhan Haji memiliki 176 siswa dengan 10 kelas, terdiri dari Kelas I (1 kelas), Kelas II (2 kelas), Kelas III (2 kelas), Kelas IV (2 kelas), Kelas V (2 kelas), dan Kelas VI (1 kelas); 2) SDN 2 Labuhan Haji memiliki 203 siswa dengan 10 kelas, terdiri dari Kelas I (2 kelas), Kelas II (2 kelas), Kelas III (1 kelas),

¹⁸ Israwati Amir, Nursalam Nursalam, and Irvan Mustafa, "Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Kurikulum Merdeka Belajar," *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* (2022): 204–215.

Kelas IV (2 kelas), Kelas V (2 kelas), dan Kelas VI (1 kelas); 3) SDN 3 Labuhan Haji memiliki 89 siswa dengan 6 kelas; 4) SDN 4 Labuhan Haji memiliki 192 siswa dengan 7 kelas; 5) SDN 5 Labuhan Haji memiliki 121 siswa dengan 6 kelas; dan 6) SDN 6 Labuhan Haji memiliki 147 siswa dengan 6 kelas.

1) Implementasi Kurikulum Merdeka

Di Gugus 1, Kecamatan Labuhan Haji, hanya ada satu sekolah dasar, yaitu SDN 4 Labuhan Haji yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan opsi "mandiri berubah" sejak tahun akademik 2021/2022 karena menjadi sekolah penggerak. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru SDN 4 Labuhan Haji, ditemukan bahwa sekolah ini telah menerima berbagai pelatihan dan lokakarya yang difasilitasi oleh Balai Guru Penggerak dan didampingi oleh Fasilitator Sekolah Penggerak. Sekolah tersebut telah menerapkan Kurikulum Merdeka melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, seperti proyek penguatan profil Pancasila siswa (P5), kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Tahun ini, SDN 4 Labuhan Haji telah menerapkan Kurikulum Merdeka untuk kelas I, II, IV, dan V.

Berdasarkan wawancara dengan guru di SDN 1, SDN 2, SDN 3, SDN 5, dan SDN 6 Labuhan Haji, ditemukan bahwa sekolah-sekolah ini masih memilih opsi pertama, "mandiri belajar", untuk implementasi Kurikulum Merdeka, sehingga semua kelas masih menggunakan Kurikulum Merdeka. Para guru memiliki pemahaman tentang Kurikulum Merdeka karena telah mengikuti sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan INOVASI NTB dan LPTK. Selain pelatihan mengenai Kurikulum Merdeka, para guru dan kepala sekolah juga diperkenalkan dan dilengkapi dengan pengetahuan tentang melakukan penilaian literasi awal untuk memetakan keterampilan literasi siswa.

Guru-guru yang mengikuti pelatihan terkait Kurikulum Merdeka, yang diselenggarakan oleh INOVASI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, bervariasi mulai dari guru kelas I hingga guru kelas IV. Hampir semua guru juga memiliki akun belajar.id, yang dapat digunakan untuk mengakses Platform Merdeka Mengajar (PMM), sebuah aplikasi pendamping untuk Kurikulum Merdeka. Selain kepala sekolah dan guru, pengawas juga menerima pelatihan mengenai Kurikulum Merdeka. Meskipun SDN 1, SDN 2, SDN 3, SDN 5, dan SDN 6 Labuhan Haji memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, sekolah-sekolah ini belum memulai implementasi kurikulum tersebut pada tahun akademik saat ini.

2) Dukungan dari Dinas Pendidikan untuk IKM

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang dipimpin oleh Bapak Izzuddin sebagai Kepala Dinas, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya

terhadap kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Bentuk dukungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Mensosialisasikan Kurikulum Merdeka melalui Pengawas Pembina dan meminta sekolah-sekolah untuk memilih opsi yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah.
- b) Berkolaborasi dengan dua Institusi Pendidikan dan Pelatihan Guru (LPTK), yaitu Universitas Hamzanwadi dan IAIH Hamzanwadi, bersama dengan INOVASI, untuk menyelenggarakan lokakarya bagi pejabat pengawas, kepala sekolah, dan guru mengenai implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
- c) Melantik 102 kepala sekolah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sebelumnya menjadi fasilitator guru, dengan tujuan meningkatkan implementasi IKM secara optimal. Pelantikan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2023, di Gedung Diklat Kabupaten Lombok Timur. Dalam pidatonya, Kepala Dinas menekankan pentingnya memberikan ruang dan waktu bagi semua guru untuk mengakses platform Merdeka Belajar dan Belajar.id. Ia menyoroti bahwa kementerian terus memantau kemajuan sistem ini.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmennya dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Kolaborasi dengan LPTK, INOVASI, dan penunjukan fasilitator guru sebagai kepala sekolah lebih lanjut memperkuat dedikasi mereka untuk memastikan implementasi IKM yang sukses di wilayah tersebut.



Gambar 2. Pelatihan Pengawas dan Kepala Sekolah\

3) Tantangan dan Kendala

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka meliputi: a) Meskipun para guru telah dilengkapi dengan pengetahuan tentang Kurikulum Merdeka, komitmen mereka terhadap implementasinya masih rendah, seperti yang diungkapkan oleh beberapa Pengawas, bahwa tidak ada petunjuk tentang cara mengalokasikan dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk kegiatan IKM, dan kebijakan atau peraturan dari otoritas yang lebih tinggi masih belum jelas; b) Banyak guru memiliki keterampilan teknologi yang rendah, yang menghambat kemampuan mereka untuk sepenuhnya mengakses PMM (Platform Merdeka Mengajar). Namun, platform ini menyediakan pengetahuan berharga untuk mengoptimalkan IKM; c) Masih terdapat kurangnya sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan IKM, dan pengetahuan guru tentang proyek P5 (Penguatan Profil Pancasila) sangat rendah atau minimal.

Berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian ini, diperoleh temuan bahwa implemementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak tidak mengalami banyak hambatan dan kendala karena sekolah mendapat pendampingan langsung dari kementerian melalui penugasan fasilitator di masing-masing sekolah dalam implemementasi kurikulum merdeka dengan melakukan berbagai aktivitas seperti PMO, Lokakarya, dan coaching. Sedangkan untuk sekolah yang implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri yaitu sekolah non penggerak, cenderung mengalami kendala dan kesulitan karena tidak adanya pelatihan yang disiapkan oleh kementerian. Sekolah hanya diminta untuk memaksimalkan akses platform Merdeka mengajar (PMM) untuk membantu sekolah dalam implemantasi kurikulum Merdeka.

E. Penutup

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang diterapkan di lembaga pendidikan, yang membutuhkan penyesuaian dan tak dapat dihindarkan menghadapi hambatan dalam implementasinya. Terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yaitu melalui Program Sekolah Penggerak (PSP) dan secara mandiri (IKM-M). Sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Timur memiliki pemahaman yang beragam mengenai implementasi Kurikulum Merdeka, dan tidak semua sekolah mengadopsinya dengan sepenuh hati. SDN 4 Labuhan Haji adalah sekolah penggerak yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun akademik 2021/2022, memilih opsi "mandiri berubah" dan menjadi generasi pertama dari PSP. Sekolah dasar lainnya di Gugus 1 Kecamatan Labuhan Haji masih memilih opsi "mandiri belajar" dan belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur mendukung sepenuhnya implementasi Kurikulum Merdeka. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka, bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepengawasan (LPTK) dan INOVASI untuk mengadakan workshop, serta menunjuk kepala sekolah dari kalangan guru aktivis. Kepala Dinas Pendidikan mendorong kepala sekolah untuk memberikan waktu dan ruang bagi para guru untuk mengakses platform merdeka belajar menggunakan akun belajar.id.

Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka meliputi komitmen rendah dari para guru, ketidakjelasan petunjuk dan kebijakan dari otoritas yang lebih tinggi, keterampilan teknologi yang rendah dari para guru dalam mengakses platform merdeka belajar (PMM), keterbatasan fasilitas pendukung, dan pengetahuan minim para guru tentang profil siswa Pancasila.

Berdasarkan temuan ini, jelas bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Lombok Timur masih dalam tahap awal. Meskipun terdapat sekolah penggerak yang telah berhasil menerapkannya, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk implementasi Kurikulum Merdeka yang optimal di semua sekolah. Dari hasil riset ini diperoleh informasi bagaimana kesiapan sekolah non penggerak dalam implementasi kurikulum Merdeka dan bentuk dukungan dinas Pendidikan terkait. Penelitian ini masih terbatas pada kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka namun belum sampai melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah yang telah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, Ifa, Eka Diana, and Dhevin M Q Agus Puspita. "Merdeka Belajar Dan Pendidikan Kritis Paulo Friere Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 02 (2021): 45–61.
- Amir, Israwati, Nursalam Nursalam, and Irvan Mustafa. "Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Kurikulum Merdeka Belajar." *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* (2022): 204–215.
- Anas, Anas, Akhmad Zaenul Ibad, Nova Khairul Anam, and Fitri Hariwahyuni. "Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI)(Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022)." *Journal of Creative Student Research* 1, no. 1 (2023): 99–116.
- Daga, Agustinus Tanggu. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 Hingga Kebijakan Merdeka Belajar)." *Jurnal Edukasi Sumba (JES)* 4, no. 2 (2020): 103–110.
- Hadi, Abdul, Marniati Marniati, Rispa Ngindana, Musyarrifah Sulaiman Kurdi, Muqarranah Sulaiman Kurdi, and Fauziah Fauziah. "New Paradigm of Merdeka Belajar Curriculum in Schools." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 2 (2023): 1497–1510.
- Kemendikbudristek. "Dasar, Fungsi, Dan Tujuan Pendidikan Nasional." *Kemendikbudristek*. Last modified 2022.

- <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/dasar-fungsi-dan-tujuan-pendidikan-nasional/>.
- Rachmawati, Tutik. "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *UNPAR Press 1* (2017): 1–29.
- Rahayu, Restu, Rita Rosita, Yuyu Sri Rahayuningsih, Asep Herry Hernawan, and Prihantini Prihantini. "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak." *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6313–6319.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Siswoyo, Agung. *Merdeka Belajar*. Penerbit Lakeisha, 2021.
- Sudarman, S Pd. "BUKU AJAR PENGEMBANGAN KURIKULUM" (n.d.).
- Sumarsih, Ineu, Teni Marliyani, Yadi Hadiyansah, Asep Herry Hernawan, and Prihantini Prihantini. "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 8248–8258.
- Suryani, Lilis, Rofiqotul Khusna, Novita Deviyanti, Nunuk Marlina, Tine Mulyaningsih, Wiwin Zakiyah, Sri Yanti, and Asri Binawati. "Independent Curriculum Implementation Training Ror the Learning Teacher Community in Setu District." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa 2*, no. 1 (2023): 39–50.
- Triwiyanto, Teguh. *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran*. Bumi Aksara, 2022.
- Yulianti, Marsela, Divana Leli Angraini, Siti Nurfaizah, and Anjani Putri Belawati Pandiangan. "PERAN GURU DALAM MENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 290–298.
- Yuliyanti, Yuliyanti, Evi Damayanti, and Lukman Nulhakim. "Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar Di Indonesia Dan Perbedaan Dengan Kurikulum Di Beberapa Negara." *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 11, no. 3 (2022): 95–106.